

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan industri keuangan Islam khususnya perbankan syariah telah meningkat secara signifikan. Perbankan syariah diakui sebagai lembaga yang paling cepat pertumbuhannya di dunia perbankan dan keuangan. Industri perbankan syariah telah diterima secara mendunia dan telah berubah dari industri “bayi” sejak 1970 atau lebih dari 25 tahun yang lalu, hingga sekarang menjadi salah satu industri yang paling layak dan menjadi model alternatif untuk lembaga intermediasi,¹ dimana bank menjadi lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) yang menyimpan kelebihan dananya di bank dengan pihak kekurangan dana (*deficit unit*) yang meminjam dana ke bank.

Industri perbankan syariah khususnya di Indonesia mengalami pertumbuhan yang bervariasi sesuai dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia di landasi oleh Undang-undang (UU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan. Salah satu Undang-undang yang melandasi awal perkembangan Perbankan

¹ Tahir, “*Analysing Islamic Bank Efficiency in Malaysia Using the Standart and Alternatives Approaches to Data Envelopment Analysis*” dalam Fitri Sagantha (ed). Analisis Efisiensi Perbankan Syariah dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) dan Nilai Islam, *Tesis*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), hlm.18

Syariah adalah Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008. Dengan Undang-undang tersebut, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional memiliki landasan hukum yang cukup kuat, sehingga mendorong pertumbuhan industri ini lebih cepat.²

Percepatan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia sampai saat ini terus didorong oleh Otoritas Jasa Keuangan menuju industri perbankan syariah yang sehat, berkelanjutan, dan berkontribusi positif dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkualitas. Dengan progres perkembangannya yang *impresif*, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, dan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional semakin signifikan.³

Perkembangan perbankan syariah sampai september 2017 dari segi aset secara perlahan meningkat, yaitu sebesar 19,09% , meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 17,58%. Peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi oleh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan modal. Secara triwulan aset bank syariah tumbuh 4,47%, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dengan pertumbuhan 5,42%.

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak yang kekurangan dana (*deficit unit*) untuk kegiatan usaha dan

² Hani Werdi Apriyanti, “Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia : Analisis Peluang dan Tantangan”, dalam *Jurnal Maksimum*, Vol.1, No.1, hlm.17, September 2017.

³ “Aset Perbankan Syariah Per Agustus 2017”, *Bisnis Indonesia*, 18 Oktober 2017.

kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam.⁴ Bank Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan juga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Umum Syariah merupakan bank yang dalam aktivitasnya, baik menghimpun ataupun menyalurkan dananya berdasarkan prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Prinsip utama dalam hal ini yaitu sesuai dengan hukum Islam yang bersumber pada Al-qur'an dan Hadits yang melarang riba dan melakukan investasi pada usaha-usaha yang digolongkan haram.⁵ Adapun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bank syariah yang di dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS merupakan badan usaha yang setara dengan bank perkreditan rakyat konvensional.⁶ Selain Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), terdapat Unit Usaha Syariah (UUS) dimana Unit Usaha Syariah (UUS) ini adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.⁷

Dalam beberapa tahun terakhir, perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan, khususnya untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm.8.

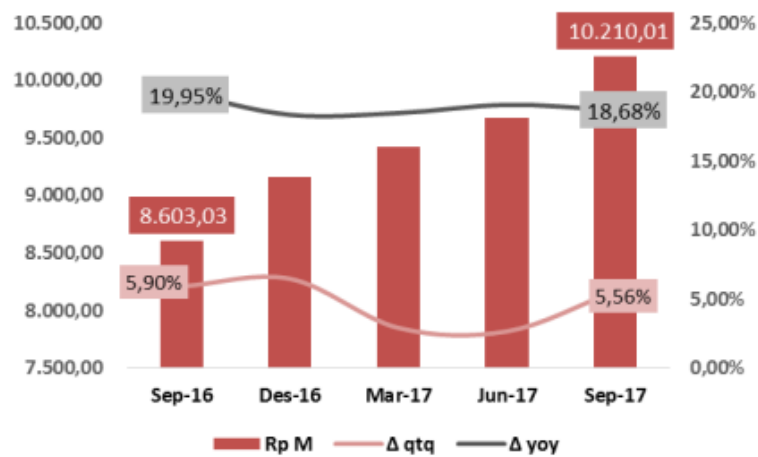
⁵ Anita Puspitasari, "Analisis Efisiensi Bank Umum Syariah Di Indonesia Dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) (Studi pada BUSN Devisa Bank Umum Syariah periode 2014-2015)", *Skripsi*, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), hlm. 7

⁶ Listya Gita Jianti, "Efisiensi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah", dalam Naufal dan Firdaus, "Analisis Efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Wilayah Jabodetabek Dengan Pendekatan Two Stage Data Envelopment Analysis (DEA)", dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No.2, hlm. 201, 2017

⁷ "Unit Usaha Syariah", <https://www.syariahbank.com/perbedaan-bus-bank-umum-syariah-dan-uus-usaha-unit-syariah>, akses 12 Januari 2019

Pertumbuhan aset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sampai dengan September 2017 tumbuh hingga 18,68% menjadi Rp 10,21 triliun, sedikit melambat dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 19,95%. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya Dana Pihak Ketiga (DPK) dan permodalan BPRS. Disamping itu, pembiayaan sebagai komponen terbesar aset juga tumbuh lebih baik dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Gambar 1.1. Pertumbuhan Aset BPRS di Indonesia



Sumber : SPI September 2017

Perbankan syariah di Indonesia memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional, dengan ini berarti bahwa perkembangan perbankan syariah tidak lepas dari peran pentingnya bagi perekonomian, terutama dalam menjalankan amanah dari pemilik dana dan menyalurkannya untuk usaha produktif khususnya pengusaha menengah, kecil dan mikro (UMKM), yang merupakan peran BPRS dalam pengembangan masyarakat. BPRS sebagai salah satu lembaga keuangan

penyedia sumber modal yang dapat mendayagunakan potensi pembiayaan yang ada, khususnya UMKM yang berada di daerah operasionalnya sehingga terjalin hubungan yang saling menguntungkan.⁸

UMKM merupakan sektor potensial dalam penyaluran pembiayaan BPRS untuk menggerakkan perekonomian sektor riil. Pembiayaan yang diberikan salah satu sumber modal bagi UMKM yang jumlahnya mencapai 57,8 juta unit usaha atau memiliki proporsi sebesar 99,99% dari keseluruhan jenis unit usaha di Indonesia. Pertumbuhan BPRS dari segi aset atau jumlah tentunya mempengaruhi perkembangan UMKM yang masih menjadi unit usaha penyerap tenaga terbanyak di Indonesia, sebesar 96,99% dari pangsa pasar tenaga kerja.⁹ Sehingga, kinerja BPRS perlu diperhatikan dan ditingkatkan untuk mendukung perkembangan ekonomi sektor riil melalui UMKM.

Dalam memberikan pembiayaan, BPRS mempunyai peran yang cukup berpengaruh terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil (UMK) baik di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan. BPRS memiliki prosedur pelayanan yang sederhana, proses yang cepat dan skema pembiayaan yang mudah, disesuaikan dengan lokasi yang tersebar di daerah perkotaan maupun pedesaan. Hal ini berbeda dengan bank umum

⁸ Emir Hamara, "Analisis Efisiensi BPR dan BPRS Di Kabupaten Bogor", *Skripsi*, (Bogor : Institut Pertanian Bogor, 2017), hlm. 13

⁹ Kementrian Koperasi dan UMKM RI. "Data UMKM" dalam Naufal dan Firdaus (ed). Analisis Efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Wilayah Jabodetabek Dengan Pendekatan Two Stage Data Envelopment Analysis (DEA) (STEI Tazkia, Sentul City Bogor, 2017), hlm. 197

yang hanya memberikan pembiayaan baku (tidak dapat disesuaikan) serta lokasinya yang hanya terdapat diperkotaan.¹⁰

Perbankan syariah sebagai bagian dari industri perbankan nasional memiliki peran yang tidak berbeda dengan bank konvensional lainnya. Namun dalam hal sistem operasional, bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah dituntut untuk dapat menyalurkan dana dari nasabah yang memiliki kelebihan dana kepada nasabah yang membutuhkan dana secara efektif dan efisien. Efektif lebih memiliki arti sebagai ketepatan pemberian pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan, sedangkan efisien lebih memiliki arti kesesuaian hasil antara *input* yang digunakan dan *output* yang dihasilkan.¹¹

Efisiensi pada perbankan merupakan alat ukur dalam menentukan apakah perbankan tersebut mengalami suatu kinerja yang maju atau mundur. Jika perbankan mempunyai tingkat *efisiensi* yang maksimal, maka perbankan tersebut dapat dikatakan mengalami kinerja yang baik atau mengalami kemajuan dan sebaliknya. Secara sederhana dengan melihat Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), maka dapat melihat apakah bank tersebut *efisien* atau tidak. Jika biaya operasi lebih

¹⁰ Mahmud Fauzi, "Efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Provinsi Jawa Tengah", dalam *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, Vol. 4, No. 1, hlm. 32, Januari 2018

¹¹ Arif Indarto, "Analisis Perbandingan Efisiensi Perbankan Syariah Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)", *Skripsi*, (Yogyakarta : Universitas UIN Sunan Kalijaga, 2010), hlm. 18

besar dari pada pendapatan operasi, maka bank tersebut mengalami performa atau kinerja yang kurang baik atau tidak *efisien*.¹²

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio yang menunjukkan besaran perbandingan antara beban atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional suatu perusahaan pada periode tertentu. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Semakin rendah rasio BOPO, menunjukkan bahwa bank tersebut sudah melakukan *efisiensi* dalam mengeluarkan biaya-biaya operasionalnya.¹³

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pertumbuhan aset BPRS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu BPRS tumbuh pesat dikarenakan banyaknya muncul UMKM yang menggunakan jasa penyaluran pembiayaan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹⁴

Dengan meningkatnya pertumbuhan UMKM di Provinsi DIY, menyebabkan BPRS dituntut untuk dapat menyalurkan dananya secara efektif dan efisien. Karena BPRS juga dianggap sebagai instansi yang memberikan prosedur pelayanan yang lebih mudah dibandingkan Bank

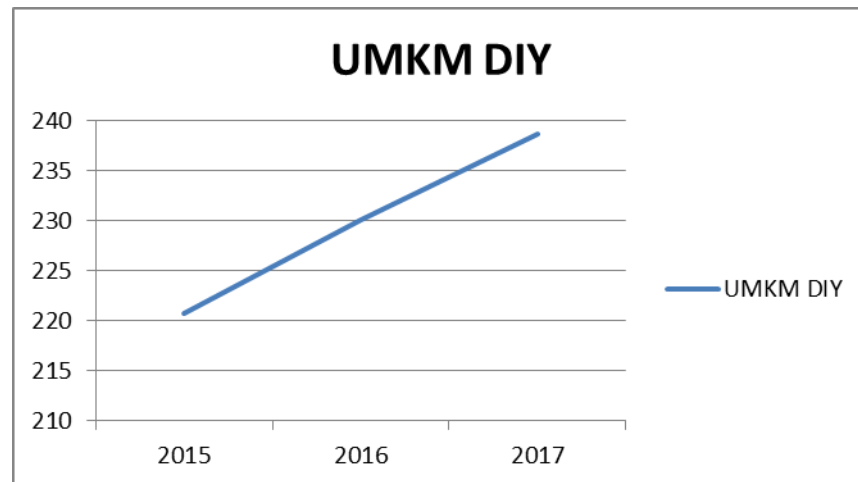
¹² Mahmud Fauzi, "Efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Provinsi Jawa Tengah", dalam *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, Vol. 4, No. 1, hlm. 32, Januari 2018

¹³ Weni Welani, "Analisis Tingkat Efisiensi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis", *Skripsi*, (Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia, 2016), hlm. 2

¹⁴ <http://jogja.tribunnews.com/2016/02/22/tingkat-pertumbuhan-bank-syariah-yogyakarta-ungguli-nasional> diakses pada 22 Januari 2019

Umum Syariah, sehingga masyarakat lebih memilih untuk berpihak pada BPRS dalam mengajukan pembiayaan.

Gambar 1.2. Perkembangan UMKM di DIY



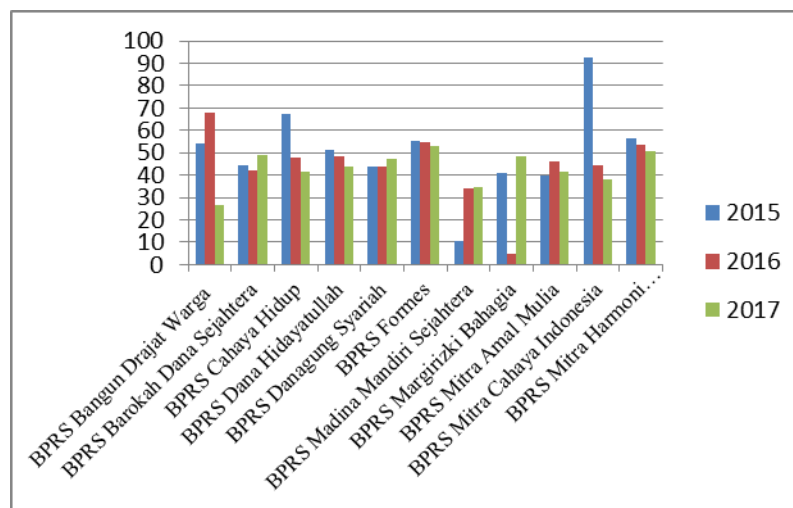
Sumber : Departemen Koperasi dan UKM

Dari gambar 1.2. diatas dapat dilihat bahwa perkembangan UMKM dari tahun 2015-2017 meningkat dengan pesat, dimana untuk tahun 2017 jumlah UMKM di DIY berjumlah 238.619 unit UMKM, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 230.047 unit UMKM yang ada di Provinsi DIY. Dengan banyaknya UMKM yang ada di di DIY ini mengakibatkan meningkatnya pembiayaan yang akan disalurkan oleh BPRS. Sehingga BPRS dituntut untuk dapat menyalurkan dana secara efektif dan efisien. Untuk melihat tingkat *efisiensi* BPRS bisa ditunjukkan oleh rasio BOPO masing-masing BPRS.

Untuk nilai rasio BOPO Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dijelaskan pada gambar 1.3. di bawah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Cahaya Indonesia

sebesar 92.37% pada akhir tahun 2015 menunjukkan adanya indikasi kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tersebut belum efisien. Tingkat *efisiensi* yang tinggi sangat memberikan pengaruh positif terhadap kinerja industri Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dari itu tingkat *efisiensi* dapat mencerminkan mengenai kinerja usaha dari perbankan syariah.¹⁵

Gambar 1.3.
Nilai BOPO BPRS Di DIY 2015-2017



Nama BPRS	2015	2016	2017
BPRS Bangun Drajat Warga	54.15	67.8	26.54
BPRS Barokah Dana Sejahtera	44.36	42.27	48.89
BPRS Cahaya Hidup	67.62	48.13	41.51
BPRS Dana Hidayatullah	51.41	48.15	43.89
BPRS Danagung Syariah	44.11	43.81	47.52
BPRS Formes	55.16	54.67	52.95
BPRS Madina Mandiri Sejahtera	10.66	34.24	34.4
BPRS Margirizki Bahagia	40.68	4.69	48.3
BPRS Mitra Amal Mulia	39.92	46.18	41.82
BPRS Mitra Cahaya Indonesia	92.37	44.62	38.09
BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta	56.73	53.77	50.65

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Publikasi BPRS (Data Diolah)

¹⁵ Tamara Kusuma Ajeng, "Pengukuran Kinerja Efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Provinsi Jawa Timur Dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA), *Skripsi*, (Surabaya : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, 2018), hlm. 4

Upaya untuk meningkatkan kinerja BPRS agar mampu bertahan dalam menghadapi ketatnya persaingan industri keuangan pada awalnya melakukan evaluasi kinerja dengan menggunakan rasio keuangan,¹⁶ tetapi menurut beberapa pakar penilaian *efisiensi* tidak bisa dilakukan secara parsial tetapi harus memperhitungkan seluruh *output* dan *input* yang ada. Maka digunakan pendekatan *parametrik* dan *non-parametrik*. Pendekatan *parametrik* diantaranya *Stochastic Frontier Approach* dan *Distribution Free Approach*. Sedangkan pendekatan *non-parametrik* diantaranya adalah *Data Envelopment Analysis* dan *Free Disposable Hull*. Dengan metode analisis *efisiensi* maka dapat mengetahui bank-bank mana yang telah efisien dalam hal penggunaan *input* dan pengeluaran *output*. Metode analisis *efisiensi* yang paling banyak dipakai adalah metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) karena pendekatan DEA memiliki kelebihan dapat mengidentifikasi *input* atau *output* suatu bank yang digunakan sebagai referensi yang dapat membantu untuk mencari penyebab dan jalan keluar dari sumber ketidakefisienan suatu bank.¹⁷

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA), dengan tujuan akan diperolehnya sumber-sumber ketidakefisienan (*inefisiensi*) pada manajerial perbankan. Pengukuran efisiensi sebenarnya tidak akan menghadapi kendala jika bank

¹⁶ Muhammad Syafii Antonio, dkk, "An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqasid Index Implementation in Indonesia and Jordania", *Jurnal Of Islamic Finance*, Vol.1, No.1, 2012, IIUM Institute Of Islamic Banking and Finance, hlm. 13

¹⁷ Fadhil Muhammad Naufal, "Analisis Efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Wilayah Jabodetabek dengan Pendekatan Two Stage Data Envelopment Analysis (DEA)" dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.5, No.2, 2017

hanya memiliki satu *input* dan satu *output* saja untuk proses produksinya, namun hal demikian jarang dijumpai karena bank biasanya memerlukan *multi input* dan menghasilkan berbagai *output*.¹⁸

Efisiensi BPRS pada penelitian kali ini menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA). Obyek penelitian merupakan BPRS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta . Jumlah BPRS yang berada di DIY pada saat ini ada 12 BPRS. Melalui penelitian ini, diharapkan mampu menjawab permasalahan BPRS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan memperoleh gambaran seberapa efisien, serta bagaimana meningkatkan *efisiensi* BPRS di DIY.

Penelitian terkait dengan Analisis Efisiensi Bank menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) di antaranya dilakukan oleh Fauzi yang menguji efisiensi bank pembiayaan rakyat syariah di provinsi Jawa Tengah mengemukakan bahwa terdapat 5 BPRS yang efisien selama 5 tahun berturut-turut, dan 21 BPRS dalam kondisi *Inefisien*.¹⁹

Penelitian dari, Nugroho yang meneliti tentang Analisis Efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Surakarta Menggunakan *Data Envelopment Analysis* (DEA) Periode 2015 mengemukakan bahwa untuk BPRS yang beroperasi secara Efisien selama periode penelitian terdapat 2 BPRS yaitu BPRS Dana Mulia dan BPRS Harta Insan Karimah, dan *Inefisiensi* BPRS disebabkan oleh variabel *output* (pembiayaan,

¹⁸ Adrian Sutawijaya dan Ety Puji Lestari, "Efisiensi Teknik Perbankan Indonesia Pascakritis Ekonomi : Sebuah Studi Empiris Penerapan Model DEA", dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 10, No.1, hlm.51-52, 2009

¹⁹ Mahmud Fauzi, "Efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Provinsi Jawa Tengah", dalam *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, Vol.4, No.1, 1 Januari 2018.

piutang dan Penempatan pada Bank lain) dengan tingkat efisiensi yang berbeda-beda.²⁰

Sedangkan penelitian dari Ajeng, yang menguji tentang Pengukuran Kinerja Efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Provinsi Jawa Timur Dengan Metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) menghasilkan kesimpulan sebagian besar Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Jawa Timur selama periode 2012 sampai dengan 2016 belum bekerja secara efisien.²¹

Berdasarkan latar belakang masalah dan hasil dari beberapa penelitian terdahulu, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul “*Analisis Efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) (Studi Empiris Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2015-2017)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Ukuran Tingkat Efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* periode tahun 2015 – 2017 ?

²⁰ Taufiq Adi Nugroho, “Analisis Efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Surakarta Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) Periode 2015”, *Skripsi*, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016).

²¹ Tamara Kusuma Ajeng, “Pengukuran Kinerja Efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Provinsi Jawa Timur Dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)”, *Skripsi*, (Surabaya : STIE Perbanas Surabaya, 2018).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2015 – 2017.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan meningkatkan ilmu pengetahuan tentang kajian perbankan syariah mengenai Efisiensi Bank dengan metode DEA. Serta penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penelitian sebelumnya yang masih terdapat perbedaan hasil dan objek penelitian, sehingga nantinya akan bermanfaat dan menjadi sumber informasi yang dapat digunakan bagi pihak yang berkepentingan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bank

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk mengevaluasi kinerja bank, khususnya yang berkaitan mengenai Efisiensi Bank. Sekaligus dapat menjadi bahan pertimbangan bagi bank syariah untuk meningkatkan efisiensi pada periode berikutnya.

b. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya dibidang bank syariah dan sebagai perbandingan untuk penelitian sejenis berikutnya.

c. Bagi Penulis

Untuk tambahan wawasan dan tambahan pengetahuan penulis tentang analisis efisiensi bank dengan menggunakan metode DEA.